



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

UNIT KERJA : MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LUKMAN. AR
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 481045

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.640.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m²/211 m² di GAYO LUES, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
2. Tanah Seluas 500 m² di GAYO LUES, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
3. Tanah Seluas 13000 m² di GAYO LUES, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 3.935 m²/35 m² di GAYO LUES, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
5. Tanah Seluas 10086 m² di GAYO LUES, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
6. Tanah Seluas 2.334 m² di GAYO LUES, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
7. Tanah Seluas 2083 m² di GAYO LUES, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
8. Tanah Seluas 975 m² di GAYO LUES, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
9. Tanah Seluas 425 m² di GAYO LUES, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
10. Tanah Seluas 100 m² di GAYO LUES, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
11. Tanah Seluas 350 m² di GAYO LUES, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000



12. Tanah Seluas 6300 m² di GAYO LUES, WARISAN Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	243.000.000
1. MOTOR, YAMAHA XEON SEPEDA MOTOR Tahun 2012, WARISAN Rp. 3.000.000		
2. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000		
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	14.950.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	75.000.000
Sub Total	Rp.	1.972.950.000
III. HUTANG	Rp.	13.778.690
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.959.171.310

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi penuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.